

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil suatu simpulan umum dan simpulan khusus mengenai penelitian tentang “Makna Toleransi Dalam Bingkai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama” sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Simpulan umum dari penelitian ini adalah bahwasannya toleransi yang ada pada tubuh Nahdlatul Ulama adalah toleransi yang sama halnya diajarkan oleh Islam *ahlusunnah wal jama'ah*, tidak ada satupun perbedaan yang tampak dari hal tersebut. Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam terbesar di Indonesia, dan sudah barang tentu menjadikan Islam, hukum positif, dan kultural yang ada di Indonesia sebagai sumber rujukan dalam menjalankan roda organisasinya.

Nahdlatul Ulama dikenal masyarakat dengan sikap tolerannya, bahkan dengan sikap toleransinya yang besar inilah NU kemudian dilabeli sebagai ormas yang liberal dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan paradigma yang salah dalam memahami NU. Karena dalam tubuh NU terdapat berbagai macam nilai yang tidak bisa dipahami secara sepintas dan tanpa ilmu pengetahuan yang cukup. Termasuk dalam memahami tindakan yang diambil Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan politik kebangsaan.

Meski toleransi adalah suatu keharusan dalam menyikapi perbedaan yang sudah menjadi suatu keniscayaan, namun dalam toleransi juga terdapat rambu-rambu yang mesti dijaga, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar agama dalam pemilihan calon pemimpin. Maka sikap Nahdlatul Ulama secara keorganisasian tidak memperkenankan untuk memilih pemimpin non-muslim sebagai pemimpin nasional, meskipun dengan tujuan melaksanakan politik kebangsaan yang dianut oleh NU. Adapun dalam hal pemilihan pemimpin di tingkat wilayah provinsi dan kota atau kabupaten, maka memilih pemimpin non-muslim diperkenankan, itupun jika tidak ada lagi orang muslim yang mampu untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut, atau jika kondisi di tempat tersebut merupakan

mayoritas masyarakat non-muslim yang memegang teguh adat dan kebudayaan serta kepercayaan terhadap agama tertentu. Memahami makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan NU, berarti memahami bagaimana NU bertoleransi dalam bingkai politik kebangsaannya yang didasari oleh nilai-nilai dasar yang ada pada tubuh NU secara menyeluruh, bukan melalui pemberitaan parsial terhadap NU melalui ucapan-ucapan oknum yang belum tentu itu merupakan resmi sesuai dokumen yang ada pada tubuh NU.

5.1.2. Simpulan Khusus

Setelah melakukan analisis yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memaparkan bagaimana simpulan khusus dalam penelitian yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah agar lebih sistematis. Adapun simpulan khususnya adalah sebagai berikut:

- 5.1.2.1.** Sumber rujukan NU dalam merealisasikan makna oleransi dalam bingkai politik kebangsaan ini adalah 1. Al-Qur'an (Q.S Al-Hujurat, ayat 10-13), (Q.S Al-Kafirun, ayat 6), (Q.S Al-Baqarah, ayat 256), (Q.S Yunus, ayat 99), (Q.S Al-Maidah, ayat 48), (Q.S Al-Baqarah, ayat 139). 2. Hadits Nabi Muhammad SAW (berkaitan dengan perilaku seorang muslim kepada muslim atau manusia lain), (berkaitan dengan menjaga kebersamaan), (yang berkaitan dengan silaturahmi). 3. *Sirah Nabawiyah*. 4. *Ijma'* ulama. 5. *Qiyas*. 6. Sosio historis NU (diambil dari nilai-nilai dalam pendirian NKRI), (perjalanan dakwah Islam oleh walisongo), (dari perjalanan sejarah NU). 7. Hukum positif Indonesia (Pancasila, UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama), SKB Menteri tentang toleransi. 8. Hasil muktamar NU (AD/ART). 9. *Qonun Asasi*. 10. *Bahtsul Masail*.
- 5.1.2.2.** Cara PWNU Jawa Barat dalam merealisasikan makna toleransi yang dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada pada tubuh PWNU, baik pengurus PWNU maupun badan otonom yang ada pada tubuh NU. Dengan tujuan untuk menjadikan warga negara secara umum dan warga *nahdliyin* secara khusus agar menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).
- 5.1.2.3.** Hambatan dan upaya yang dihadapi PWNU Jawa Barat dalam merealisasikan makna toleransi yang dipedomani dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara terdapat dari tiga unsur. Unsur masyarakat atau warga *nahdliyin* dalam memahami konsep yang ada, dan unsur kedua adalah pemerintah sebagai *stakeholder* dalam mendukung kegiatan melalui bantuan *financial*, serta unsur ketiga adalah adanya praktik politik praktis yang memanfaatkan kesempatan. Hingga kemudian NU melakukan upaya dengan cara terus memberikan pengajaran kepada masyarakat, merangkul pemerintah guna mendukung secara keseluruhan dan meminimalisir adanya dugaan politik praktis.

- 5.1.2.4.** Sikap Nahdlatul Ulama terkait adagium “Pemimpin Non-Muslim yang Kompeten Lebih Baik daripada Pemimpin Muslim yang Tidak Kompeten” dalam Konteks Politik Kebangsaan ini adalah bahwasannya NU secara keorganisasian memerintahkan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim jika bukan dalam kondisi darurat dan sebelum itu terjadi. Seandainya hal itu terjadi lalu terpilih pemimpin non-muslim, sikap NU adalah menerima apa yang sudah menjadi konsensus bersama sebagai perealisasi politik kebangsaannya dan tetap mengontrol serta mendampingi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan umat Islam.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

Setelah mengkaji hasil temuan di lapangan yang disesuaikan dengan tinjauan pustaka yang ada mengenai penelitian ini, maka penulis memiliki implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1) Bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat

- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa mengabdikan dirinya bagi kedaulatan negara dan bangsanya.
- b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat dan juga badan otonom yang ada pada kepengurusan PWNU Jawa Barat harus tetap menjalankan tugas sebagai pelaksana dalam merealisasikan makna toleransi yang dipedomani oleh NU dalam bingkai politik kebangsaannya sesuai dengan sumber rujukan yang telah digunakan NU secara keorganisasian.
- c. Pelaksanaan program yang ada harus disertai dengan informasi yang lengkap dan menyeluruh kepada warga *nahdliyin* agar mereka bisa memahami

informasi yang ingin disampaikan oleh PWNU Jawa Barat dengan bekerjasama dengan seluruh kepengurusan NU yang berada dibawah garis koordinasi PWNU Jawa Barat.

2) Bagi Pemerintah (Lembaga Eksekutif)

- a. Pemerintah sebagai *stakeholder* harus mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama guna menjaga kedaulatan bangsa dan negara baik secara *financial* maupun dukungan secara moril.
- b. Pemerintah juga harus senantiasa bekerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara.

3) Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat secara umum hendaknya memiliki *framing* dalam membaca berita dan informasi yang belum tentu kebenarannya, agar tidak mudah terbawa arus yang dimanfaatkan kepentingan politik praktis.
- b. Masyarakat secara umum harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dengan salah satunya mempelajari pendidikan kewarganegaraan sejak dini.
- c. Warga *nahdliyin* khususnya harus tetap memberikan contoh kepada masyarakat umum terkait bagaimana menjaga toleransi dalam bingkai politik kebangsaan.

4) Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya harus memberikan kajian-kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama yang bersifat aktual.
- b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya melakukan kerjasama dengan unsur ormas dan juga pemerintahan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjaga kedaulatan NKRI
- c. Mengarahkan bagi setiap calon lulusannya untuk turut andil dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi melalui penelitian dan pengabdian.

- d. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral dapat mengaplikasikan apa yang telah diajarkan dalam kehidupan nyata pada lingkungan masyarakat.

5) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Harus lebih mendalami lagi bagaimana peran NU dalam menjaga kesetabilan negara melalui politik kebangsaannya
- b. Mendalami pemikiran salah satu tokoh NU yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada tubuh NU
- c. Mengkaji bagaimana warga *nahdliyin* memahami konsep yang ada pada tataran pengurus NU, baik PBNU atau yang berada dibawahnya.